

RASIONAL SYARIAT ISLAM MEMBAWA KESEJAHTERAAN UMAT

Prof. Dr. Hj. Wuryanti Koentjoro, SE., MM

ABSTRAK

Artikel ini menulis tentang tuntunan hidup dari Allah swt yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. yang disebut sebagai syariat Islam dan meliputi tuntunan/syariat untuk mengelola diri pribadi, mengelola keluarga, dan mengelola masyarakat-bangsa-negara. Tujuan syariat Islam pada hakekatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta bangsa-negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Individu yang beriman-bertaqwa secara benar menurut Islam tentu akan mengerjakan semua tuntunan Islam secara lengkap yang meliputi: mengerjakan ibadah mahdah, berakhlak mulia, menjalankan syariat sosial Islam sesuai dengan kapasitas yang dipunyainya, dan selalu berusaha keras menyebarkan ajaran Islam dalam semua dimensinya ke masyarakat di sekitarnya. Muslim yang berj'uang menegakkan syariat sosial-kenegaraan adalah suatu kewajiban bukanlah sesuatu yang aneh karena hal itu analog saja seperti kaum kapitalis atau kaum komunis yang berjuang keras memberlakukan sistem kapitalisme atau sistem komunisme dalam proses pengelolaan bangsa-negara. Dari sisi paradigma pembangunan pola syariat bertumpu pada pembangunan akhlak manusia untuk taat pada ajaran Allah swt dan peduli pada kondisi sesama, sedang paradigma pembangunan sekuler Barat bertumpu pada upaya menambah kekayaan materiel. Dari rasional tersebut maka tidak seharusnya masih diragukan oleh umat Islam Indonesia bahwa salah satu cara mengatasi krisis multi dimensi di negeri ini adalah "dengan pengetrapan syariat sosial dalam proses pengelolaan negara. Pada sisi lain, teori Islam menyatakan bahwa aplikasi syariat dalam pengelolaan bangsa yang plural akan mendatangkan status negara yang 'aaminan-thoyyiban',

PENDAHULUAN

MAKNA DAN TUJUAN SYARIAT ISLAM

Islam adalah tuntunan hidup dari Allah swt yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. Tuntunan hidup dalam ajaran Islam itu disebut sebagai syariat Islam dan meliputi tuntunan/syariat untuk mengelola diri pribadi, mengelola keluarga, dan mengelola masyarakat-bangsa-negara. Ajaran Islam juga mewajibkan umat Islam untuk hidup sesuai dengan syariat itu, di manapun-kapanpun, dan juga mewajibkan untuk menyebar-luaskannya ke masyarakat sekitarnya.

Fakta menunjukkan bahwa banyak orang, bahkan tidak mustahil orang yang mengaku beragama Islam sendiri, sering menjadi gelisah kalau mendengar syariat Islam. Mereka pada dasarnya jelas tidak memahami apa sesungguhnya tujuan syariat Islam itu. Ketidak fahaman tersebut yang membuat mereka menjadi khawatir atau malah ketakutan bila mendengar ada gerakan untuk penegakan syariat Islam tersebut.

Tujuan syariat Islam pada hakekatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta bangsa-negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Perjuangan Islam dalam bentuk gerakan berarti melakukan upaya keras bersama untuk menyebar luaskan ajaran Islam secara utuh atau kaffah agar dipeluk oleh manusia dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kebaikan nasib individu dan masyarakat itu sendiri. *Penyebaran penegakan ajaran Islam terhadap sasaran individu atau pribadi bertujuan untuk menyelamatkan orang tersebut agar sebagai manusia dia bisa selamat dunia akherat. Penyebaran ajaran Islam untuk lingkup keluarga dan kelompok kecil masyarakat juga untuk menyelamatkan keluarga dan kelompok kecil itu dari kemelut keluarga dan pertikaian antar warga kelompok. Perjuangan penegakan syariat sosial Islam dalam lingkup bangsa-negara juga jelas untuk menyelamatkan bangsa-negara itu dari krisis-krisis sosialnya, dan agar bisa menjadi bangsa yang maju, bermoral, aman-sejahtera, mendatangkan kemanfaatan pada bangsa lain, bukan mengeksploitasi atau menjajah bangsa lain.*

Individu yang beriman-bertaqwa secara benar menurut Islam tentu akan mengerjakan semua tuntunan Islam secara lengkap yang meliputi: **mengerjakan ibadah mahdhah, berakhlak mulia, menjalankan syariat sosial Islam sesuai dengan kapasitas yang dipunyainya, dan selalu berusaha keras menyebar luaskan ajaran Islam dalam semua dimensinya ke masyarakat di sekitarnya.**

Menurut Asshiddique dijelaskan bahwa bagi seorang muslim yang memiliki tauhid sosial atau muslim yang sadar tentang pentingnya manfaat ajaran sosial-politik Islam dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan bekerja sama saling mendukung sesamanya untuk memberlakukan syariat sosial Islam agar dipraktekkan dalam pengelolaan tatanan sosialnya agar tatanan sosial tersebut (bangsa-negara) menjadi tatanan sosial yang aman dan sejahtera. Perjuangan sosial-politik ini menuntut adanya kelompok muslim solid dan teguh bercita-cita bersama untuk mempraktekkan tuntunan sosial Islam (syariat sosial Islam) dalam proses pengelolaan tatanan sosial di mana mereka berada dengan kesiapan menghadapi persaingan/tantangan sosial-politik dari pengikut ideologi lain, seperti pemeluk ajaran sekular, komunis, dan kapitalis. Persaingan atau tantangan dari kelompok lain yang memiliki visi-misi sosial-politik berbeda inilah yang membuat perjuangan Islam dalam tingkatan sosial-kenegaraan menjadi amat rumit, dinamis, dan tidak pernah selesai. Hal ini jelas berbeda sekali dengan penerapan ajaran Islam dalam lingkup individu seperti ibadah mahdhah, pilihan makan-minuman, dan cara berpakaian, yang praktis hanya bergantung pada kemauan keras or-orang per-orang. Bahkan pengetrapan ajaran Islam dalam lingkup keluargapun hanya bergantung pada sedikit orang, khususnya suami, isteri dan anak-anak yang telah dewasa. *Muslim yang berj'uang menegakkan syariat sosial-kenegaraan adalah suatu kewajiban bukanlah sesuatu yang aneh karena hal itu analog saja seperti kaum kapitalis atau kaum komunis yang berj'uang keras memberlakukan sistem kapitalisme atau sistem komunisme dalam proses pengelolaan bangsa-negara. Justru kalau ada Muslim yang pasif saja terhadap perjuangan sosial-kenegaraan Islami seperti itulah yang aneh, dan akan jauh lebih aneh lagi jika ada muslim yang ikut-ikutan memperjuangkan tegaknya sistem kapitalis atau sistem*

komunis di negerinya sendiri yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

SUBSTANSI SYARIAT SOSIAL ISLAM

Apa substansi syariat sosial Islam yang diperjuangkan oleh gerakan Islam itu? Tentu saja substansi tersebut cukup luas dan rinci namun secara garis besar di sini akan diringkas substansi dasarnya agar cepat difahami dan direnungkan oleh semua fihak. Apakah substansi tersebut jelas tertera dalam al Qur'an dan Sunnah Nabi, sama atau berbeda dengan apa yang telah difikirkannya selama ini. Apakah substansi itu logis atau tidak. Apakah substansi itu secara ilmiah akan bisa membawa kesejahteraan bangsa atau tidak, apalagi bila bangsa itu mayoritasnya adalah muslim.

Berikut ini substansi dasar Syariat Sosial Islam (An-Nabhani) yang sayangnya secara faktual masih berada di luar praktek kehidupan sosial-kenegaraan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim:

1. *Kepemimpinan Sosial*: Pemimpin Formal dalam skala nasional dan regional seharusnya adalah Muslim taat Syariat dan berorientasi pada pemberlakuan syariat sosial Islam di wilayahnya. Pemimpin seperti ini tentu tidak akan merusak, eksploitatif, dan melakukan KKN karena dia takut adzab Allah yang akan menyimpannya di dunia-akhirat.
2. *Hukum yang diberlakukan seharusnya mellputi*: Hudud, Qisas, dan Ta'zir yang dipandu oleh al Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw yang akan membawa rasa aman dan keharmonisan sosial.
3. *Sistem Ekonomi Nasional* yang berjalan seharusnya ekonomi anti-riba dan anti-bisnis barang haram-maksiat. Tatanan ekonomi seperti ini akan menghalangi eksploitasi terhadap rakyat yang lemah dan akan membawa kepada kesejahteraan yang adil-merata. Prioritas pembangunan ekonomi syariah adalah mengangkat secepatnya rakyat yang miskin melalui subsidi nasional secara nyata untuk pemberdayaan kaum dhuafa, bukan ekonomi yang berorientasi 'quick yielding'⁵, memperbesar secepatnya 'kue nasional' yang ujung-ujungnya ternyata hanya dimonopoli dan dinikmati segelintir konglomerat dan birokrat korup.

4. *Budaya yang berkembang* di masyarakat perlu dikendalikan agar terarah pada perilaku Anti-perzinaan termasuk praktek mendekati zina seperti pornografi dan pameran aurat, anti-mabuk dalam bentuk pemberantasan minuman keras-narkoba, dan anti-perjudian. Budaya seperti itu pasti akan membawa kehormatan dan keluhuran sosial dalam masyarakat seheterogen apapun. Jelas budaya yang dikembangkan syariat Islam berbeda diametrikal dengan budaya orang lain yang mengumbar nafsu seks, pornografi, dan kekerasan, asalkan menghasilkan kekayaan atau menambah pemasukan pendapatan ke pemerintah.

Keempat bentuk Syariat Sosial Islam tersebut sampai sekarang masih terabaikan di Indonesia sehingga perlu secara bersama-sama segera didukung untuk diberlakukan oleh seluruh kekuatan sosial-politik umat Islam di negeri ini demi keberhasilan pembangunan umat dan bangsa. *Partai Politik berasas Islam* perlu secara tegas bergerak serentak dan konsisten mempromosikan dan mendukung berlakunya syariat sosial Islam tersebut di negerinya agar negeri ini tidak dikendalikan oleh sistem sosial yang bersumber pada ajaran diluar Islam sehingga mendatangkan murka Allah swt, apalagi mayoritas (sekitar 90%nya) penduduk negeri ini adalah muslim. Allah swt akan mengabaikan nasib bangsa dan negara ini bila syariatNya tidak diberlakukan dalam pengelolaan bangsa dan negara. Krisis sosial dan keterpurukan akan semakin berat bila pengelolaan negeri ini meninggalkan syariat sosial Islam dan menggantinya dengan sistem sekuler. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia jelas telah menunjukkan kegagalan serius dalam upaya pembangunan bangsa dan negara karena mengetrapkan metoda sekular dalam pengelolaan negeri ini. Altematif pengetrapan syariat sosial Islam dalam proses pengelolaan negara jelas merupakan harapan satu-satunya untuk mengangkat harkat bangsa dan keluar dari krisis nasional, apalagi mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim.

RASIONAL SYARIAT ISLAM

Dalam dunia Islam ada dua pendekatan yang bisa memberi penjelasan

akan suatu tesis dalam kehidupan, yakni pendekatan **Naqliyah dan Aqliyah**. Dalil Naqliyah adalah pendekatan melalui nash al Qur'an dan Sunnah Nabi tentang suatu masalah di mana substansinya memberi keyakinan pada umat Islam akan kebenaran tentang tesis tersebut. Sedangkan pendekatan Aqliyah adalah upaya manusiawi untuk memberikan penjelasan secara empiris apakah suatu tesis itu realistik atau tidak. Mari dicermati bagaimana pendekatan naqliyah dan aqliyah tentang tesis yang dideklarasikan oleh Konggres Umat Islam ke IV yang lalu.

Dari sisi Naqliyah perlu direnungkan pemyataan al Qur'an berikut ini:

QS Saba' (34) ayat 15-16)

- Sungguh kasus Negeri Saba' merupakan contoh nyata, negeri itu alamnya bagus dengan perkebunan di seluruh Penjuru negeri; nikmatilah rizki dari tuhanmu dan bersyukurlah kepadaNya, negerimu itu bagus kualitasnya dan tuhanmu itu penuh ampunan
- Namun ternyata mereka ingkar pada syariat Allah, maka Allah mendatangkan pada mereka banjir bandang yang luar-biasa, sehingga perkebunan mereka yg subur berubah menjadi tanah gersang dan tanamannya berganti dengan ilalang.

QS al A'raf (7): 96

- Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertaqwa (taat syariat), pasti Allah akan mendatangkan untuk mereka kesejahteraan dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka ingkar akan syariatNya maka Allah timpakan pada mereka banyak kemalangan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

QS ar-Rum (30) ayat 41

- Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan tangan mereka yang tidak taat syariat; Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka itu, supaya mereka kembali kejalan yang benar.

QS al – Baqarah (2) ayat 120

- Katakan: Sesungguhnya syariat Allah itulah cara yang benar, maka jika kalian mengikuti hawa nafsu kalian setelah datangnya petunjuk Allah itu, tidaklah akan ada pertolongan dan perlindungan dari Allah bagi kalian.

Dari makna ayat-ayat tersebut tegas ditunjukkan betapa syariat Islam itu amat terkait dengan proses" kenegaraan yang apabila diabaikan maka suatu negeri akan ditimpa berbagai krisis dan gagal dalam upaya mendatangkan

kesejahteraan dan kemaslahatan hidup masyarakat dan umat manusia.

Prinsip yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut telah dijadikan kebijakan oleh Nabi sewaktu mengelola negara Madina dengan hasil yang luar biasa, yakni membuat Madina yang semula negeri penuh konflik dan terbelakang berubah menjadi negeri adil-makmur-aman-damai, mercu suar penerang peradaban umat manusia sedunia.

Dan sisi *Aqliyah* juga jelas bahwa percontohan nabi tersebut memberi bukti empiris adanya dan keberhasilannya penerapan syariat Islam dalam pengelolaan negara. Penggunaan syariat Islam dalam pengurus negara yang selanjutnya juga dilakukan oleh empat Khalifah Utama (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib mampu membawa dunia menjadi berperadaban tinggi, penuh kemakmuran, keadilan, dan keamanan, bebas dari penindasan-eksploitasi, serta tidak ada penjajahan dan agresi. Negeri Madina berhasil menjadi inspirasi dunia selama lebih dari satu milenium (1000 tahun). Penerapan syariat Islam dalam proses mengelola negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan (poleksosbudhankam) tersebut dapat diperbandingkan dengan pola pengelolaan negara model Romawi, Persia, Napoleon, dan era sekarang yang dimulai oleh Renaissance. Tampak jelas bahwa model Barat dalam pengelolaan bangsa-negara telah menghasilkan penjajahan, perang dunia, eksploitasi ekonomi, ketimpangan sosial yang luar biasa, kejahatan-kriminalitas, dan kehancuran akhlak manusia. Dari analisis kebijakan poleksosbudhankam tampak pula perbedaan prinsip yang menyolok antara pola syariat dengan pola sekular Barat dalam pengelolaan negara, yang juga menjadi *rasional aqliyah betapa cara syariat lebih rasional untuk bisa mendatangkan kesejahteraan dan kemaslahatan sosial*. (Latief, 2000)

Dari **sisi paradigma pembangunan** (K Adiwarmanto) misalnya, pola syariat bertumpu pada pembangunan akhlak manusia untuk taat pada ajaran Allah swt dan peduli pada kondisi sesama, sedang paradigma pembangunan sekuler Barat bertumpu pada upaya menambah kekayaan materiel.

Kebijakan politik Islam memberikan penekanan pada pentingnya memperoleh pemimpin yang beriman-bertaqwa, cerdas, amanah, hidup

sederhana, dan ini jelas amat berbeda dengan kepemimpinan pola sekuler yakni orang yang mampu memperoleh dukungan banyak penduduk oleh asas demokrasi liberal yang kemudian lalu terperosok pada terpilihnya pemimpin yang hedonis, materialis, egois nepotis, dan anarkis.

Kebijakan ekonomi Islam menekankan pada penyusunan prioritas program pemberdayaan orang miskin, kebijakan perbankan tanpa riba, usaha ekonomi yang halal, dan penghematan keuangan negara melalui anggaran kecil untuk penyelenggara negara terutama pejabat tingginya dan pengembalian kekayaan negara yang dijarah serta penindakan tegas-menjerakan pada koruptor. Prinsip ekonomi makro Islam seperti itu amat bertolak belakang dengan model ekonomi kapitalis yang menekankan keuntungan materiel semata, dengan memberi gaji besar dan fasilitas mewah pada penguasa, membiarkan terjadi kerjasama antar pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan pengusaha untuk memperoleh-mengeruk kekayaan melimpah melalui eksploitasi kekayaan tanah-air dan eksploitasi terhadap rakyat pada umumnya. Pendidikan dalam kebijakan nasional yang syar'i menekankan pada peningkatan ketaqwaan pada Allah secara nyata (bukan basa-basi), akhlak yang mulia, kecerdasan intelektual yang tinggi. Hal ini juga amat berbeda dengan kebijakan pendidikan model sekuler yang mementingkan kemampuan sains-teknologi agar bisa produktif dan ujung-ujungnya juga terkait dengan menghasilkan uang bagi para pemilik modal.

Pengembangan kebudayaan dalam kebijakan yang syar'i adalah membawa masyarakat untuk berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, peduli pada kepentingan orang lain. Di bidang ini juga tampak jelas berbeda dengan kebijakan budaya pola sekuler Barat yang mengutamakan kebebasan individu, kehidupan egoistik, materialistik, dan glamor – bermewah - bermegah."

Semua contoh perbedaan kebijakan nasional itu menunjukkan bahwa pengelolaan negara berorientasi syariat Islam itu akan lebih rasional untuk mencapai kondisi bangsa menjadi bangsa yang maju, adil, sejahtera, aman dan berbudaya, sedang pola sekuler-kapitalis akan membawa masyarakat kepada krisis multi dimensi, tereksplorasi kekayaan tanah airnya, rusak akhlaknya, rusak pula lingkungan hidupnya, penuh ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan

menuju disharmonisasi sosial.

KEADAAN FAKTUAL, KONDISI IDEAL DAN PROSES PERUBAHANNYA

Dari rasional tersebut maka tidak seharusnya masih diragukan oleh umat Islam Indonesia bahwa salah satu cara mengatasi krisis multi dimensi di negeri ini adalah "dengan pengetrapan syariat sosial dalam proses pengelolaan negara. Tidak tepat jika digunakan alasan tidak ada negara muslim masa kini yang mengetrapkan syariat sosial-kenegaraan (walau sesungguhnya tidak ada kajian mendalam benarkah mereka telah mengetrapkan syariat secara benar dalam mengelola negerinya) dan berhasil membawa negerinya menjadi negeri hebat. *Justru karena umat Islam di Indonesia jumlahnya terbesar di dunia maka di negeri inilah yang seharusnya mengetrapkan syariat Islam secara utuh dalam mengelola negeri dan menjadi percontohan, karena keberhasilannya, oleh negara muslim lain yang lebih kecil jumlah penduduknya.*

Dari tinjauan kaidah manajemen, suatu institusi itu gagal mencapai tujuannya karena kekeliruan dalam mengelola institusi tersebut oleh para managernya. Demikian pula bila Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa itu tidak juga bisa menjadi negara maju dan jaya tapi sebaliknya malah menjadi negara yang terlanda krisis multi dimensi berkepanjangan walau sudah membangun lebih dari 65 tahun maka jelas hal itu akibat dari **kekeliruan dalam proses pengelolaan negeri ini oleh para pengelolanya**. Pada saat ini status Indonesia masih juga menyedihkan, yakni penduduk miskin semakin banyak, kualitas kekejaman dan tingginya angka kejahatan, besarnya hutang luar-negeri, sering ditimpa musibah, tajam ketimpangan sosialnya, buruk moral penduduknya, rendah keakraban sosialnya, dan lemah kedaulatannya. Dalam lima tahun terakhir ini kondisi tersebut semakin memprihatinkan walau tampakada perbaikan dalam hal keamanan dan beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan, index saham, dan nilai tukar rupiah. Tapi coba direnungkan siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi makro, index saham, dan nilai tukar rupiah itu.

Dengan mengutip tulisan Amsyari: Pada sisi lain, teori Islam menyatakan bahwa aplikasi syariat dalam pengelolaan bangsa yang plural (Madinah juga

plural) akan mendatangkan status negara yang '*aaminan-thoyyiban*', dengan ciri operasionalnya:

Penduduknya taat beribadah, Kemiskinan penduduk teratasi. Tidak ada hutang luar-negeri, Aman damai penuh ketentraman. Adil dalam penegakan hukumnya, Luhur budi Bekertinya. dan Tinggi martabat nasionalnya.

Dengan melihat adanya kesenjangan status antara kenyataan dengan idealnya tersebut maka harus segera dicari solusi, yakni bagaimana pengelolaan negeri dari memakai model pengelolaan yang non-syar'i menjadi pengelolaan yang syar'i. Di sinilah kemudian timbul pertanyaan bagaimana cara ini dapat dilaksanakan, Aspek tantangan dan peluang untuk itu perlu dikaji dan kemudian digunakan untuk membangun gerakan menuju arah yang efektif memperbaiki kualitas bangsa-negara ini.

Tantangan terhadap upaya proses perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sumber tantangan:

- Dari *Eksternal* (dalam-luar) yang tidak senang jika umat Islam kuat-jaya
- Dari *Internal Umat Islam* sendiri, adanya *kekurang-fahaman terhadap Islam* atau *terperangkap* dan *terpengaruh aqidah-ajaran agama lain*.
- Peran *Pemerintah* terhadap upaya perubahan tersebut juga tergantung *aqidah si pemegang kekuasaan*.

Kategori tantangan yang relatif tinggi bobotnya adalah:

- *Ketidak fahaman banyak elite pemerintah dan elite politik Indonesia* akan resiko sosial (kerusakan moral dan ekonomi oleh sistem kapitalis-sekuler yang eksploitatif) yang akan terjadi terhadap bangsa jika tidak mengetrapkan syariat Islam pada tataran sosial-kenegaraan.
- Negeri yang hampir 90% penduduknya muslim ini ***tidak memperoleh ridho Allah swt sehingga*** gagal menjadi bangsa-negara yang adil-makmur, aman-sejahtera karena ***terlanjur terus-menerus memakai jalan non-islami***.
- *Prinsip bahwa Syariat Islam dalam substansi kebijakan politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan hankam* akan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa besar tanpa mengeksploitasi dan menindas bangsa lain. Justru ditolak oleh banyak elite pemerintah dan parpol yang muslim.

- Karena untuk bisa mewujudkan masyarakat plural Indonesia menjadi adil-makmur penuh ampunan Allah (*'baladun toyyibatun wa robbun ghofuur'*) tidak akan bisa tercapai tanpa melalui kebijakan nasional oleh pihak Pemerintah, maka upaya untuk itu juga harus terkait dengan upaya penataan aqidah pejabat muslim agar menganut ajaran Islam secara kaffah, tidak hanya sekedar ajaran ritual-akhlak belaka.

Tantangan dari Dunia Internasional yang latarbelakangnya adalah pertarungan ideologis di skala global.

Berikut kasus yang jelas terjadi:

- Pelecehan pada Nabi & al Qur'an oleh Musuh Islam (Kartun nabi di Denmark, Hujatan pada al Qur'an oleh Wilder di Belanda, bahkan pernyataan melecehkan oleh Paus)
- Penindasan-penyiksaan umat al di Palestina, Afganistan, Iraq
- Tekanan ekonomi dan ancaman militer pada Iran karena upaya negeri itu untuk pengembangan teknologi nuklir dg tujuan damai
- *'Pendudukan' militer Barat di negara -negara muslim di Teluk.*

Peluang untuk keberhasilan dalam upaya melakukan perubahan cara pengelolaan negeri ini agar sesuai dengan syariat Islam :

1. Pancasila yang dianut bangsa Indonesia tidak melarang pengelolaan bangsa-negara ini oleh kebijakan yang sesuai dengan Syariat Islam.
2. Kehidupan Demokratis memberi kesempatan orang memilih cara terbaik dalam mengelola bangsa-negara.
3. Umat Islam yang semakin terdidik membuat mereka lebih rasional dalam menilai/mengevaluasi status kondisi sosialnya dan sebab-sebab keterpurukan kehidupan bangsa.
4. Perjuangan Penegakan Syariat itu dikelola dengan lebih sistematis oleh SDM yang semakin baik kualitasnya baik dalam hal aqidah maupun dalam kemampuan - operasionalnya.
5. Banyak Cendekiawan Muslim yang memahami Islam " secara kaffah sudah menduduki posisi strategis dalam Pemerintahan.
6. Sikap brutal musuh Islam terhadap umat seperti di Palestina, Afganistan, dan Iraq lebih membuka wawasan umat apa yang akan terjadi jika musuh

Islam itu dibiarkan berkuasa.

Dengan **memperhatikan aspek tantangan dan peluang pada upaya merubah pengelolaan negeri ini dari pengelolaan yang non-syar'i ke pengelolaan yang syar'i** maka aktifis Islam bisa menjajagi berbagai kemungkinan yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan nasib bangsa ini. Dari hasil kajian kedua aspek tersebut dapatlah dilakukan konsolidasi kekuatan pendukung upaya penegakan syariat Islam bidang sosial-kenegaraan di negeri ini. Gerakan nasional untuk penerapan syariat Islam dalam seluruh dimensi kehidupan akan merupakan ujung tombak perbaikan nasib bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini. Diharapkan bahwa gerakan nasional tersebut akan mampu menghasilkan tatanan sosial di mana kekuasaan tertinggi di negeri ini dipimpin oleh figur yang 'takut' pada Allah swt, amat taat syariat secara sungguh-sungguh dan menyeluruh sehingga saat dia menjadi pimpinan formal negara akan secepatnya mengetrapkan syariat sosial kenegaraan Islam dalam mengelola negerinya. Figur seperti itu di dalam bahasa syar'i nya disebut sebagai **"ulama"**. Dengan kata lain bagaimana upaya menjadikan ulama atau figur yang berkualitas ulama sebagai presiden Indonesia. (Huwaydi)

Dalam al Qur'an disebutkan bahwa ciri utama ulama adalah mereka yang 'takut' kepada Allah. Makna takut adalah mereka yang sungguh2 melaksanakan dan tidak berani melanggar tuntunan Allah swt (syariat Islam). Dalam hadits juga disebutkan bahwa ulama itu adalah pewaris misi Nabi, yakni:

1. Melaksanakan syariat dalam seluruh aspek kehidupan; dan
2. menyebar-luaskan Islam sefektif-efisien mungkin seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah.

Nabi Muhammad saw jelas sekali mencontohkan bahwa dalam ber-Islam beliau itu melaksanakan syariat dalam semua dimensi kehidupan, baik sebagai pribadi, mengelola keluarga, dan mengurus bangsa-negara yang dipimpinnya. Misi kepemimpinan nabi dalam mengelola bangsa-negara adalah mengetrapkan syariat sosial-kenegaraan Islam yang diajarkan oleh Allah swt, yang ciri utamanya antara lain:

- a. Dalam memilih pejabat yang akan menduduki jabatan publik adalah mereka

yang beriman-bertaqwa secara nyata, amanah, fathonah, dan ahli di bidangnya,

- b. Membuat kebijakan ekonomi nasional yang tidak mengandung riba, melarang bisnis maksiyat-haram, mengutamakan pemberdayaan rakyat lemah melalui subsidi nyata dari baitul mal, dan penghematan keuangan negara dengan tidak memanjakan kehidupan pejabat oleh gaji dan fasilitas jabatan.
- c. Dalam masalah hukum mengikuti asas keadilan, tidak pandang bulu, dengan substansi hukum yang menjerakan para pelaku tindak pidana melalui hukum hudud, qisas, dan ta'zir
- d. Dalam pengembangan budaya masyarakat memberi arahan tegas ke budaya yang luhur-bermartabat, antara lain memegang teguh prinsip aurat, muhrim, dan asas kesusilaan yang jauh dari pornografi-perzinahan.
- e. Pertahanan negara berprinsip pada ketahanan melalui kebersamaan seluruh kekuatan umat dan rakyat dalam mengatasi ancaman dari luar.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai contoh keteladanan Rasulullah, maka jelas bahwa ber-Islam itu bukan sekedar ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, doa dan haji tetapi juga berpolitik. Berpolitik adalah kewajiban untuk umat Islam karena didalamnya terkait dengan menyelamatkan kehidupan masyarakat melalui kepemimpinan sosial. Dengan berpolitik umat Islam bisa mengendalikan masyarakat, bangsa-negaranya agar tidak terseret arus kerusakan dan kebobrokan sosial. Berdakwah menurut Rasulullah tidak cukup dengan hanya pidato dan melakukan perbuatan mulia tetapi juga membenahi kerusakan sosial dengan jalan memegang kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Akbar S, 1992, **Pos-Moderenisme, Bahaya dan Harapan Bagi Islam**. Bandung: Mizan
- Al Qur'an**
Al Lu'luwal Marjan, (Shoheh Buhari Muslim)
- Al Mawardi. Al Ahkam As Sulthaniyah, 2000 **Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam.**, Jakarta: Darul Falah
- Amsyari, Fuad. **Islam Kaaffah, Tantangan Sosial dan Aплиhasinya di Indonesia**. 1995, Jakarta: Gema Insani Pres
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 1997, **Sistem Pemerintahan Islam**. Bangil: Penerbit Al Izzah
- Artawijaya. 2008, **Dilema Mayoritas**. Tangerang: Medina Publishing
- Asshiddique, Jimly, 2007, **Hukum Tata Negara Darurat**, Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia
- Huwaydi, Fahmi, 1995, **Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani**. Bandung: Mizan
- Huntington, Samuel, 1993,. The Clash of Civilization. **Foreign Affairs**, Summer,
- Karim, Adiwarmanto A, 2001, **Ekonomi Islam**. Jakarta: Gema Insani Press
- Khomeini, Imam, 2002, **Sistem Pemerintahan Islam**. Jakarta: Pustaka Zahra,
- Latief, Doehak, 2000, **Pembangunan Ekonomi & Kebijakan Ekonomi Global**.

Muhammadiyah University Press, Surakarta

Majelis Syura Partai Bulan Bintang, 2008, **Syariat Islam Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.**, Jakarta: PT RajaGrafindo Indonesia

Mannan, Abdul. 1995, **Teori dan Praktek Ekonomi Islam.**, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf

Rais, M. Amien, 1995, **Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia.**, Yogyakarta: Penerbit Aditya M